

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERIZINAN DI DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KELURAHAN WARAKAS TANJUNG PRIOK JAKARTA UTARA

Windy Mustika¹, Tuswoyo², Adin Dahuri³

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

Email : windymustika800@gmail.com¹, tuswoyoadmojo@gmail.com², adindahuri82@gmail.com³

*Corresponding Author

ARTICLE
INFO

ABSTRACT

Keywords

Policy implementation, Relaxation policy, Public Service

This study is based on the relaxation of licensing policies that have not been running effectively in the One-Stop Integrated Services Investment Office (DPMPTSP) of Warakas Village, Tanjung Priok District, North Jakarta. Services that have not been effective due to the handling of employees in the community has not been running smoothly and the existing infrastructure is not adequate. The purpose of this study was to determine and analyze how effective the implementation of public service policies in the Investment Office with a One-Stop Integrated Service model (DPMPTSP) Warakas Village, Tanjung Priok District, North Jakarta. To further analyze what are the obstacles that occur in the implementation of these policies and what efforts or solutions are made to overcome these obstacles. The theory used to dissect this problem is translated into four dimensions, namely communication, resources, disposition and this research is descriptive with a qualitative approach. The results showed that the relaxation policy in general has been running quite well. Nevertheless there are still some things that need to be fixed. Officers should be increased in capacity, provide services to the community concerned. In addition, some interested communities have not fully understood the permit management procedure. Some things are done as an effort to overcome these obstacles or obstacles. Employees should have developed their abilities by providing regular training. Socialization of licensing management procedures to the community needs to be intensified. The more intensive the socialization is done, the more people understand the procedure in question.

PENDAHULUAN

Pelayanan publik adalah segala kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai hak-hak dasar setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang, jasa dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan yang terkait dengan kepentingan publik. Penyelenggara pelayanan publik adalah lembaga dan petugas pelayanan publik baik Pemerintah Daerah juga Badan usaha Milik daerah yang menyelenggarakan pelayanan publik. Penerima Layanan Publik adalah perseorangan atau sekelompok orang dan atau badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban terhadap suatu pelayanan publik. Masyarakat yang merupakan pelanggan dari pelayanan publik, juga memiliki kebutuhan dan harapan pada kinerja penyelenggara pelayanan publik yang profesional. sehingga yang sekarang menjadi tugas Pemerintah pusat

maupun Pemerintahan daerah adalah bagaimana memberikan pelayanan publik yang mampu memuaskan masyarakat. Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 160 Tahun 2019 tentang Organisasi dan tata kerja Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal serta penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu.

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) memiliki tugas pokok yaitu merumuskan kebijakan teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang perencanaan dan pengendalian penanaman modal, bidang promosi, data dan informasi penanaman modal, bidang pelayanan perizinan infrastruktur, bidang pelayanan perizinan sosial dan ekonomi, bidang pengaduan, advokasi dan peningkatan layanan serta melaksanakan ketatausahaan dinas. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) membuat kebijakan baru yang dinamakan kebijakan relaksasi, Kebijakan ini bertujuan untuk memulihkan perekonomian pada saat Covid-19, Sesuai Perda Nomor 21 Tahun 2020 tentang Percepatan dan Relaksasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dalam Rangka Mendorong Aktivitas Perekonomian pada Masa Pandemi Covid-19. Adapun kebijakan pelayanan terkait adanya Pandemi Covid-19 Pemerintah DKI Jakarta, telah melaksanakan peraturan baru yang dinamakan Kebijakan Relaksasi dimana Permohonan Perizinan melalui Website. Dimana kebijakan Perizinan seperti: IUMK dan IMB

IUMK adalah Izin Usaha Mikro dan Kecil IUMK itu merupakan izin bagi para pelaku usaha mikro dan kecil yang bertujuan membantu pelaku usaha dalam melanjutkan dan mengembangkan usaha mereka. Karena ada banyak manfaat yang diperoleh pelaku usaha dengan memiliki izin yakni usaha Anda memiliki legalitas atau payung hukum yang sah, lebih mudah dalam hal pengajuan pembiayaan perbankan untuk perkembangan usaha, meningkatkan kredibilitas usaha di mata pelanggan dan memudahkan untuk mengikuti promosi melalui pameran yang diselenggarakan oleh pemerintah/swasta. IMB adalah Izin Mendirikan Bangunan itu merupakan produk sebuah hukum yang berisi perizinan yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, merawat atau merobohkan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku, Kebijakan Relaksasi IMB ini bertujuan sebagai solusi jalan tengah bagi warga untuk mendapatkan sejumlah akses dasar, disaat tanah yang ditempati belum memiliki legalitas hukum. Keseriusan Pemerintah DKI Jakarta dalam melaksanakan kebijakan baru yaitu untuk mempermudah masyarakat dalam mengajukan permohonan perizinan dan Dibuktikan dengan Dikembangkannya Kebijakan Relaksasi dalam Pelayanan masyarakat pada tingkat Kota Administrasi hingga Kelurahan.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti di Kelurahan Warakas terkait pelayanan Publik di bidang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selalu meningkat dan bahkan menjadi titik tumpu pelayanan. Namun masih terdapat beberapa kelemahan yang dijumpai dalam hal melayani masyarakat. Seperti kurangnya sarana dan prasarana sehingga pelayanan menjadi sangat terbatas. Sebagaimana data yang ada di kelurahan hanya ada 3 personil dan satu perangkat komputer dengan jaringan internet yang kurang memadai di kelurahan warakas. Terkait Pelayanan dengan adanya pandemic covid-19 membuat pemerintah kesulitan untuk melakukan sosialisasi terkait penggunaan website pelayanan, selain itu yang menjadi kendala adalah warga tidak teredukasi secara langsung, terkait bagaimana tahap-tahap pengajuan dan persiapan berkas hingga pengambilan hasil. Apalagi belum semua warga memiliki literasi digital yang memadai, sehingga tidak bisa mengakses layanan digital yang tersedia. Selain itu juga dibarengi dengan kompetensi petugas yang melayani, mulai dari cara berkomunikasi dengan warga ataupun menjelaskan perihal persyaratan.

Persyaratan yang seharusnya bisa dijelaskan secara jelas menjadi rumit karena kepastian terhadap kebijakan persyaratan juga tidak ada checklistnya, yang mungkin bisa membantu saat menerangkan persyaratan Kompetensi berikutnya adalah pemahaman petugas terhadap aplikasi atau web pelayanan yang seharusnya dialami dan dipelajari betul untuk membuat pelayanan semakin efektif dan efisien. Hal ini bisa dijumpai pada keluhan warga masyarakat yang datang atau selesai melaksanakan pelayanan, dan menunjukkan pelayanan yang masih kurang memuaskan. Berdasarkan Fenomena tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik Bidang Perizinan Di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kelurahan Warakas Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara.

KAJIAN PUSTAKA

1. **Teori Dasar Administrasi Publik** : Definisi Administrasi Publik Menurut Caiden, dalam (Erika Revida, dkk, 2020:3) mengatakan bahwa : “Administrasi publik adalah fungsi dari pembuatan keputusan, perencanaan, perumusan tujuan dan sasaran, penggalangan kolaborasi menggunakan dpr serta organisasi-organisasi kemasyarakatan untuk memperoleh dukungan warga serta dana bagi acara pemerintah, pemantapan dan perubahan organisasi, pengerahan dan pengawasan pegawai, kepemimpinan, komunikasi, pengendalian dan lain-lain yg dijalankan oleh lembaga eksekutif dan lembaga-lembaga pemerintahan lainnya.”
2. **Implementasi Kebijakan** : Menurut Van meter dan Van Horn dalam Winarno (2016:135): “Implementasi Kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang di arahkan untuk mencapai tujuantujuan yang telah di tetapkan dalam keputusan keputusan kebijakan sebelumnya.”
3. **Pelayanan Publik** : Menurut Santoso dalam R. Wulandari (2018), pelayanan publik adalah pemberian jasa, baik oleh pemerintah, pihak swasta kepada masyarakat, dengan atau tanpa pembayaran untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan masyarakat.
4. **Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)** : DPMPTSP adalah salah satu organisasi perangkat daerah yang ada di DKI Jakarta yang bertanggung jawab pada Gubernur. DPMPTSP memiliki tugas untuk membantu pelaksanaan penilaian dan pelaporan tugas, melakukan penetapan fasilitas pada bidang perizinan pembangunan, perizinan ekonomi, sosial budaya, serta ketenagakerjaan. DPMPTSP juga mengelola data dan info buat perizinan dan non perizinan, melakukan koordinasi tugas pada bidang pengembangan, perencanaan, dan pengaduannya.

Kerangka Pemikiran

Diawal tahun 2019 bulan maret terdapat wabah virus baru yang masuk ke Indonesia yaitu Coronavirus Disease (Covid-19). Serangan Covid-19 yang terjadi secara global hampir diseluruh Negara termasuk di Indonesia. Hal ini telah melumpuhkan setiap aspek kehidupan. Pemerintah harus memiliki strategi dalam meningkatkan pelayanan publik. Pemerintah terus berupaya memperbaiki dan meningkatkan kualitas supaya memberikan pelayanan yang optimal. Salah satu upaya pemerintah yang dilaksanakan di masa pandemi covid-19 yaitu membuat kebijakan relaksasi, namun kebijakan relaksasi tersebut pun masih belum mencapai hasil yang maksimal. Keberhasilan suatu kebijakan publik dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling berhubungan. Maka dari itu, untuk memaksimalkan pelayanan publik memerlukan kerjasama yang baik antara Pemerintah dengan Pegawai sebagai yang memberikan atau penyelenggara pelayanan dan masyarakat sebagai yang menerapkan atau pengguna layanan tersebut. Untuk menghindari

perluasan penelitian, penulis membuat alur kerangka konseptual. Dengan ini peneliti, melakukan penelitian membuat alur kerangka konseptual, dari strategi tersebut dapat dilihat. Bagaimana mengenai Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik Bidang Perizinan di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kelurahan Warakas Tanjung Priok Jakarta Utara, Apa saja hambatan yang terjadi dalam meningkatkan pelayanan publik, Apa saja upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam meningkatkan pelayanan public. Penulis menggunakan teori (George C. Edward III). Terdapat 4 indikator, variabel yang dimasukkan sebagai indikator yang mempengaruhi implementasi, sebagai berikut: (1) Komunikasi, mengenai apakah pesan tersebut tersampaikan dengan jelas, lengkap atau dengan cara memberikan sosialisasi yang disampaikan kepada masyarakat dilakukan secara tatap online dengan cukup jelas, mudah dipahami. (2) Sumber Daya, mengenai apakah sumber daya manusia, sarana dan prasarana sudah memberikan pelayanan secara optimal, memadai kepada masyarakat dalam pelayanan publik. (3) Disposisi, mengenai apakah sikap dan komitmen dari pegawai sudah memahami kebijakan publik terkait pelaksanaan dan langkah kerja serta kemampuan untuk melakukan kebijakan untuk melaksanakan kebijakan publik. (4) Struktur Birokrasi, mengenai apakah struktur organisasi sebagai pelaksana kebijakan sudah menyiapkan standar operating prosedur (SOP) yang jelas dan mudah dipahami. Dan menjadi bahan pertimbangan agar mudah dilaksanakan dan diterapkan oleh semua pihak secara efektif, efisien.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian dengan metode kualitatif, (Sudayono,2017). Jenis data yang digunakan dalam studi ini meliputi data primer dan sekunder. Data sekunder berupa profil, visi-misi, tugas pokok dan fungsi serta jenis-jenis perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Utara. Selain data sekunder, studi ini terutama menggunakan data primer untuk keperluan analisis studi. Data primer tersebut meliputi berbagai informasi mengenai DPMPTSP di Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Utara yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam dengan berbagai narasumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik Bidang Perizinan di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPDTSP) Kelurahan Warakas Tanjung Priok Jakarta Utara.

Berdasarkan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya dalam keberhasilan kebijakan relaksasi, penulis menganalisis dengan Teori George Edward III bahwa dalam melakukan kebijakan relaksasi perlu adanya metode yang tepat dalam mengimplementasikannya dengan baik, sebagai berikut : Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi.

1) Komunikasi

Untuk dapat mengukur keberhasilan suatu kebijakan dapat dilihat dari komunikasi antara penyelenggara kebijakan dengan masyarakat. Komunikasi merupakan proses maupun syarat untuk menentukan tingkat keberhasilan implementasi tersebut terkait tentang adanya Implementasi Kebijakan bidang Perizinan di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Warakas. Hal tersebut sejalan dengan pendapat dari informan 1 dan 3 menunjukkan bahwa komunikasi yang dilakukan oleh pegawai

DPMPTSP Kelurahan Warakas sudah berjalan cukup baik yaitu telah dilaksanakannya sosialisasi secara online melalui Whatsapp group mengenai kebijakan relaksasi dan pemberitahuan mengenai tata cara permohonan secara online mengenai Implementasi Kebijakan di DPMPTSP Kelurahan tersebut.

2) Sumber Daya

Mengenai apakah sumber daya manusia, sarana dan prasarana sudah memberikan pelayanan secara optimal, memadai kepada masyarakat dalam memenuhi pelayanan publik. Dalam hal ini sumber daya manusia dilihat dari penyelenggara kebijakan dalam hal ini belum cukup baik. Karena masih diperlukan peningkatan Pendidikan, pelatihan, pelayanan dan pengetahuan terkait sistem informasi untuk pelayanan berbasis web, selain itu perlu di tingkatkan jumlah sumber dayanya serta keterampilannya.

3) Disposisi atau Sikap

Disposisi dilihat dari para pelaku kebijakan dan ditinjau dari komitmen atau kesediaan dari pelaku kebijakan. Menurut informan masyarakat diberikan sosialisasi melalui pemberitahuan Implementasi pelaporan data secara digital.

4) Struktur Birokrasi

Penyelenggara kebijakan telah membuat regulasi tentang Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik Bidang Perizinan di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Warakas Tanjung Priok Jakarta Utara. Dalam pelaksanaan sudah berjalan dengan baik.

2. Hambatan dalam Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik Bidang Perizinan di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kelurahan Warakas Tanjung Priok Jakarta Utara

Hambatan yang dialami Unit Pengelola Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu cukup beragam, yaitu Komunikasi dimana belum adanya perluasan informasi terkait adanya kebijakan relaksasi, Kemudian Sumber Daya Manusia (SDM) selain masih terbatas, juga belum seluruhnya memahami secara teknis proses pelayanan karena sering kali terjadi rotasi pegawai, sarana dan prasarana yang masih terbatas. Hambatan lainnya yaitu Disposisi atau sikap pelaksana harus di tingkatkan lagi untuk melayani masyarakat.

3. Solusi Mengatasi Hambatan

Demi keberlangsungan pelayanan publik yang berkualitas tinggi dan untuk menciptakan kelancaran rutinitas fungsi yang efektif, maka Unit Pengelola Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Warakas Tanjung Priok Jakarta Utara perlu melakukan beberapa langkah upaya dalam mencari solusi terhadap hambatan yang dialami. Seperti yang dijelaskan pada hasil penelitian Unit Pengelola Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Warakas Tanjung Priok Jakarta Utara mengambil langkah solusi seperti meningkatkan pelayanan public berbasis website, agar masyarakat yang belum mengerti, bisa dengan mudah mengajukan permohonan melalui website, meningkatkan informasi yaitu Kerja sama dengan bagian Kominfo (Komunikasi dan Informasi) DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta, untuk bisa mengajarkan penggunaan aplikasi berbasis web pelayanan. Hal ini dilakukan agar petugas mampu menjelaskan secara detail dan paham penggunaan aplikasi tersebut dan mampu mengajarkan kepada warga yang tidak mengerti, membuat kebijakan bersama terkait dengan persyaratan yang ditetapkan bersama Lurah, dan DPMPTSP

Kelurahan Warakas, untuk mencapai kesepakatan bersama terkait persyaratan yang disyaratkan dalam sebuah pelayanan, dan dituangkan kedalam buku panduan persyaratan pelayanan atau buku elektronik, serta lembaran checklist persyaratan pada setiap permohonan dan Memberlakukan subsidi Sumber Daya Manusia (SDM) antar Satuan Pelaksana di Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jakarta Utara demi menutupi kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM).

KESIMPULAN

Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik bidang Perizinan di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kelurahan Warakas Tanjung Priok Jakarta Utara terlaksana cukup baik dalam melayani masyarakat, Namun dalam pelaksanaannya belum cukup dikatakan baik, dikarenakan adanya beberapa Standar Operasional Prosedur (SOP) yang belum di mengerti oleh sebagian masyarakat. Masih terdapat kendala terkait kebijakan relaksasi yakni Sumber Daya dan sarana prasarana yang masih kurang baik, sehingga memperlambat dalam melaksanakan pelayanan publik. Hambatan dalam implementasi Kebijakan Pelayanan Publik bidang Perizinan di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kelurahan Warakas Tanjung Priok Jakarta Utara yaitu belum adanya perluasan informasi terkait kebijakan relaksasi, Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum memahami secara teknis proses pelayanan dikarenakan kurangnya SDM, sarana prasarana yang masih kurang baik, sehingga memperlambat dalam melaksanakan pelayanan publik. Upaya atau solusi dalam mengatasi kendala tersebut yaitu, upaya yang dilakukan Pemkot DKI Jakarta adalah meningkatkan sosialisasi tentang prosedur pelayanan kepada masyarakat seperti membuat program kebijakan yang kreatif untuk menarik minat masyarakat adalah hal yang cukup efektif untuk dilakukan. Selain itu mengenai Sumber Daya Manusia dan Disposisi atau sikap diperlukan peningkatan pendidikan dan pelatihan pelayanan serta pengetahuan terkait system informasi untuk pelayanan berbasis web.

Guna mencapai keberhasilan dalam implementasi Kebijakan Pelayanan Publik bidang Perizinan di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kelurahan Warakas Tanjung Priok Jakarta Utara. Pemerintah Pusat, Kementerian Investasi/BKPM, dan Kementerian Dalam Negeri melakukan harmonisasi terhadap kebijakan Relaksasi. yang berbasis web. Selain itu, diharapkan menambah sumber daya manusia yang berkompeten, hal tersebut bertujuan agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik tanpa mengikutsertakan instansi lain. Dalam hal meningkatkan Pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kelurahan Warakas Tanjung Priok Jakarta Utar. diharapkan lebih meningkatkan kecakapan dalam memberikan pelayanan, hal tersebut bertujuan agar dalam pemberian pelayanan lebih efektif. Untuk menghindari hambatan dalam melaksanakan pelayanan secara daring, diharapkan Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Warakas Tanjung Priok Jakarta Utara menjalin komunikasi dan koordinasi dengan instansi lainnya untuk mencari solusi, agar terciptanya keseragaman persepsi, sehingga proses pelayanan secara daring tidak lagi terhambat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, H. A. (2019). *Kepemimpinan, Budaya Organisasi Dan Pelayanan Publik* . Serang, Banten : CV. AA. RIZKY .
- Dr. Riduwan, M. (2015). *Kala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian* . Bandung: ALFABETA.
- Edison, E. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia* . Bandung: Alfabeta.
- Erwan Agus Purwanto, D. R. (2012). *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Flippo, E. B. (2012). *Manajemen Personalialia (Penerjemah Mos'ud)* . Jakarta : Erlangga.
- Indiahono, D. (2017). *Kebijakan Publik* . Yogyakarta : Gava Media .
- Irawan, B. (2016). *Kapasitas Organisasi dan Pelayanan Publik* . Jakarta : Publica Press.
- Creswell, J.W., C. (2013). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan Mixed* . Yogyakarta : Pustaka Belajar .
- Mangkunegara, A. P. (2015). *Manajemen Sumber Daya Manusia* . Bandung : PT. Remaja Rosda Karya .
- Moenir, H. (2015). *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia* . Jakarta : Bumi Aksara.
- Mulyadi, M. (2016). *Metode Penelitian Praktis Kuantitatif dan Kualitatif* . Jakarta: Publica Press.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif* . Bandung: Alfabeta.
- Zaenal Mukarom, M. W. (2016). *Membangun Kinerja Pelayanan Publik* . Jawa Barat : CV Pustaka Setia .

JURNAL

- Mulyadi, Akmal. 2020. *Penyelenggaraan Pelayanan Pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (Usaha Jasa Laundry) Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru*. Pekanbaru: Universitas Islam Riau.
- UMAM, KHAIRUL dan Ulum, Bahrul dan Rahman Fitra, Tasnim 2020. *Penerapan Peraturan Darah Kabupaten Tanjung Jabung Timur No 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Studi DPMPTSP Kabupaten Tanjung Jabung Timur)*. Kota Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- Wida Samsi Yudani,2021. *Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Online Single Submission (OSS) Oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sukoharjo*. Jawa Tengah: Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Sari, Novita Indah 2022. *Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Selama Pandemi di Kabupaten Pemalang*. Jawa Tengah: Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Hendi Nuryandi 2019. *Strategi Dinas Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Dalam Meningkatkan INVESTASI DI KABUPATEN TULUNGAGUNG*. Jawa Timur: UIN Satu Tulungagung.
- Budya Pryanto Putra & Aleknaek Martua Nababan, Vol 1 No 2 2019. *Investment Optimization For Apec Member Countries (Economic Studies & Challenge Of DPMPTSP DKI Jakarta)* : Universitas Indonesia.